

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya mengarah pada kebijakan serta program-program yang bertujuan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap negara. Pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pangan serta gizi bagi warga masyarakat secara unggul (Amindiyah, Cahim, Sutikno, 2022) . Maka dari itu, salah satu proses Pembangunan harus melibatkan peran pemerintah dan stakeholder yang mampu bekerjasama dalam upaya mewujudkan kebutuhan gizi bagi masyarakat (Sutikno & Naufal, 2023). Permasalahan gizi merupakan permasalahan yang hampir ada di setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju. Peran status gizi merupakan salah faktor penentu dari konsumsi dan kualitas manusia dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian indikator keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) salah satunya adalah tanpa adanya kelaparan atau kekurangan gizi. Kemudian indikator tanpa kelaparan ini berfokus pada status gizi pada anak. Usia anak memang usia yang rentan akan kekurangan gizi, yang akan berdampak pada terjadinya *stunting* pada anak. (Nurjanah, 2024).

Permasalahan *stunting* menjadi salah permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara yang ada. Pada tahun 2016, secara global hampir 23 persen anak-anak di bawah usia lima tahun kebawah mengalami *stunting*. *Stunting* menjadi salah satu perhatian negara-negara berkembang maupun negara maju karena efek jangka panjang yang menyebabkan anak tidak dapat mencapai kapasitas pertumbuhan secara maksimal, cenderung memiliki kemampuan kognitif yang rendah, serta lebih rawan terkena penyakit di masa yang akan datang. Hal ini juga yang nantinya berdampak pada kemampuan kerja dan produktifitas kerja, yang akan berpengaruh pada pendapatan kerja secara mikro dan perkembangan perekonomian secara makro. (Erika Nur Khasanah, 2023).

Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* terus berupaya melalui lintas sektoral yang ada baik sektor vertikal maupun sektor horizontal. Dari sektor vertikal berupa sinkronisasi kebijakan dari

Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa. Sedangkan dari sektor horizontal setiap pemerintahan disetiap tingkatan berkordinasi dengan lintas bidang yang memang berwenang dalam upaya penanggulangan *stunting*. (Irma Fitriana Ulfah, 2023). Kebijakan serta regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang kemudian diinterpretasikan ke dalam rangkaian program yang ada di tiap Kementrian atau Lembaga yang ada dan kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokoknya sebagai salah satu wujud dari bentuk intervensi pemerintah pada tiap tingkatan. (Erika Nur Khasanah, 2023).

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang menjadi salah satu fokus Pemeritah Pusat dalam percepatan penurunan *stunting* yang ada di Indonesia. Jawa Tengah sendiri memiliki kasus *stunting* yang cukup bervariasi dengan kota Semarang yang memiliki program sosialisasi yang aktif, sedangkan kabupaten Brebes sendiri memiliki hambatan partisipasi Masyarakat. (Kurnia Lintang Larasati, 2024). Jawa Tengah sendiri memiliki prevalensi *stunting* 27,20 persen ditahun 2019 kemudian mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 20,80 persen dan sedangkan menurut data SKI Prevalensi *stunting* Jawa Tengah di tahun 2023 sebesar 20,7 persen. Walaupun angka *stunting* di Jawa Tengah mengalami penurunan akan tetapi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Kota yang masih memiliki prevalensi *stunting* yang cukup tinggi (Ferita Nur Alifisyiam, 2023).

Table 1. Grafik Prevalensi *Stunting* berdasarkan Provinsi Di Indonesia

No.	Nama Data	Nilai
1	Nusa Tenggara Timur	35,3
2	Sulawesi Barat	35
3	Papua	34,6
4	Nusa Tenggara Barat	32,7
5	Aceh	31,2
6	Papua Barat	30
7	Sulawesi Tengah	28,2
8	Kalimantan Barat	27,8
9	Sulawesi Tenggara	27,7
10	Sulawesi Selatan	27,2
11	Kalimantan Tengah	26,9
12	Maluku Utara	26,1
13	Maluku	26,1
14	Sumatera Barat	25,2
15	Kalimantan Selatan	24,6
16	Kalimantan Timur	23,9

No.	Nama Data	Nilai
17	Gorontalo	23,8
18	Kalimantan Utara	22,1
19	Sumatera Utara	21,1
20	Jawa Tengah	20,8
21	Sulawesi Utara	20,5
22	Jawa Barat	20,2
23	Banten	20
24	Bengkulu	19,8
25	Jawa Timur	19,2
26	Sumatera Selatan	18,6
27	Kep Bangka Belitung	18,5
28	Jambi	18
29	Riau	17
30	DI Yogyakarta	16,4
31	Kepulauan Riau	15,4
32	Lampung	15,2
33	DKI Jakarta	14,8
34	Bali	8

Sumber: Buku Saku SSGI Tahun 2022.

Data Prevalensi *stunting* yang ada di tiap Provinsi yang ada di Indonesia

Kabupaten Brebes menjadi salah satu dari salah satu Kabupaten prioritas dalam percepatan penurunan *stunting*. Dimana Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten dengan prevalensi *stunting* paling tinggi di Jawa Tengah dengan prevalensi *stunting* sebesar 29,1% di tahun 2022, sebagai mana tabel dibawah:

Table 2. Grafik Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.

No.	Nama Kabupaten	Nilai
1	Kabupaten Brebes	29,1
2	Kabupaten Temanggung	28,9
3	Kabupaten Magelang	28,2
4	Kabupaten Purbalingga	26,8
5	Kabupaten Blora	25,8
6	Kabupaten Rembang	24,3
7	Kabupaten Sragen	24,3
8	Kabupaten Batang	23,5
9	Kabupaten Pekalongan	23,5
10	Kota Pekalongan	23,1

Sumber: Buku Saku SSGI Tahun 2022.

Data prevalensi *stunting* yang ada di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dimana Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten dengan Prevalensi *stunting* paling tinggi. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penanganan *stunting* ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2019 tentang

penanggulangan stunting. Dimana dalam Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk meningkatkan status gizi Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, dalam implementasinya penanggulangan *stunting* tersebut juga dibuat suatu penguatan kelembagaan secara kerjasama yang tidak dilakukan secara sektoral saja akan tetapi juga melibatkan pihak lain diluar sektoral baik bentuk kerjasama dan dukungan serta program dari Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa begitupun sebaliknya (Supriyanto, 2023). Selain itu melalui Surat edaran Bupati Brebes No. 5/1134/965/IV/2023. Tentang Penggunaan Dana Desa untuk intervensi Penurunan *stunting* Prioritas Balita usia 6 Sampai dengan 24 Bulan di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023. Memeberikan arahan dalam intervensi penanggulangan stunting berupa. Pertama data hasil penimbangan serentak bulan agustus 2022, data BNBA nya ada di Bidan Desa masing-masing. Data tersebut harus divalidasi oleh petugas gizi Puskesmas untuk menentukan intervensi yang tepat. Kedua Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak *stunting* dan gizi buruk/kurang. Ketiga stimulasi deteksi tubuh kembang anak yang dilakukan oeh tenaga kesehatan. Keempat seluruh Camat untuk melakukan supervisor ke Desa dalam upaya penurunan angka *stunting* di Kabupaten Brebes. (Surat Edaran Bupati Brebes No. 5/1134/965/IV/2023.) Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes Kecamatan Paguyangan masuk kedalam salah satu Kecamatan prioritas lokasi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana Keputusan Bupati Brebes No. 050/87 Tahun 2023. Tentang penetapan lokasi prioritas percepatan penurunan *stunting* tahun 2024. Sebagaimana tabel berikut:

Table 3. Lokasi prioritas percepatan penurunan *stunting* tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1.	Paguyangan	Pandansari
		Winduaji
		Wanatirta
2.	Tonjong	Kutamendala
3.	Bulakamba	Grinting
		Kluwut
		Bulusari
		Bangsri
		Rancawuluh
		Pulogading
4.	Banjarharjo	Penanggapan
5.	Bumiayu	Dukuhturi
		Puwatan

Kalinusu
Kaliwadas

Sumber: Keputusan Bupati Brebes No. 050/87 Tahun 2023.

Desa prioritas penanganan *stunting* yang ada di Kabupaten Brebes tahun 2024.

Kecamatan Paguyangan sendiri memiliki 12 Desa diantaranya Cilibur, Cipetung, Kedungoleng, Kretek, Pagojengan, Paguyangan, Pakujati, Pandanasari, Ragatunjung, Taraban, Wanatirta, Winduaji. Dan dari 12 Desa yang ada Desa Pandansari merupakan Desa dengan prevalensi *stunting* paling tinggi diantara 12 desa yang ada. Dibanding dengan tahun sebelum dimana ditahun 2022 terdapat 58 Baduta *stunting* (27,36%) sebagaimana tabel berikut:

Table 4. jumlah baduta *stunting* tahun 2022

No	Desa	Tahun	Jumlah Balita <i>Stunting</i>	Presentase
1.	Kedungoleng	2022	17	8.02 %
2.	Pakujati	2022	21	9.91 %
3.	Pandansari	2022	58	27.36 %
4.	Winduaji	2022	81	38.21 %
5.	Wanatirta	2022	35	16.51 %

Sumber: Puskesmas Winduaji Tahun 2022.

Data prevalensi *stunting* yang ada di Kecamatan Paguyangan di tahun 2022. Dimana ditahun tersebut Winduaji merupakan Desa dengan prevalensi tertinggi.

Ditahun 2023 Desa Pandansari terjadi kenaikan kasus *stunting* dimana Desa Pandansari menjadi Desa dengan prevalensi *stunting* paling tinggi dimana jumlah balita yang terindikasi kasus *stunting* sebanyak 129 anak dan baduta sebanyak 34 anak. Walaupun tingkat baduta menurun akan tetapi masih menjadi salah satu yang paling tinggi di Kecamatan Paguyangan hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah:

Table 5. Jumlah Bumil , Baduta Dan Balita *Stunting* Tiap Desa Se-Kecamatan tahun 2023

No	Desa	Jumlah Balita <i>Stunting</i>
1	Cilibur	15
2	Cipetung	8
3	Kedungoleng	53
4	Kretek	27
5	Pagojengan	13
6	Paguyangan	27
7	Pakujati	46
8	Pandansari	129
9	Ragatunjung	45
10	Taraban	9
11	Wanatirta	123
12	Winduaji	110
JUMLAH		605

Sumber: Koryon P3KB Kec. Paguyangan, per 31 Desember 2023

Prevalensi *stunting* yang ada didesa se-kecamatan paguyangan berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN kec. Paguyangan.

Dari data tersebut Desa Pandansari merupakan desa dengan angka *stunting* paling tinggi di Kecamatan Paguyangan dari 12 Desa yang ada dimana jumlah balita *stunting* sebanyak 129 anak. Pemerintah Desa Pandansari telah melaksanakan berbagai macam kebijakan dan program guna menekan angka *stunting* yang ada diantaranya Pemberian Makanan Tambahan (PMT), DASHAD (Dapur Sehat), GEMARIKAN (gerakan gemar makan ikan), dan AKS (Audit Kasus *Stunting*) dari semua program yang ada hampir seluruhnya bertujuan untuk menunjang perkembangan gizi balita yang diwujudkan dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat mengurangi angka *stunting* yang ada di Desa Pandansari.

Kemudian untuk melihat apakah suatu program sudah berjalan efektif atau belum dapat dilakukan dengan adanya kajian terkait efektivitas program dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Efektivitas program menurut Ensiklopedia umum administrasi dalam (Norsanti, 2021), efektivitas berasal dari kata kerja efektif, yaitu terjadinya suatu efek yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Tjokroamidjojo (Pasalong, 2008) dalam (Mahrudi, 2022), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti yang direncanakan, mencapai tujuan yang diharapkan. Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis ingin mengangkat judul terkait “Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes”.